

# Kondisi Sektor Informal Perkotaan dalam Perekonomian Jayapura-Papua

Arung Lamba

Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, Kampus Baru Waena, Jl. Raya Sentani Abepura, Jayapura

**Abstract:** *The aims of this article is to search about the condition informal sector of cities in Jayapura, Papua, the main useful in economics sides, flexibilities grade and productivities. By using the methodology of result research have been done, so that written can be concludes (1) the condition of informal sector in Jayapura very flexible to recruit the employeers that have difference background of their live (gender, ages, tribes, education grade eventhough the capital). whether by seeing the productivity sides almost of them can be get more advantages better than the cost of production. (2) the factors can be influences the grade of flexibility informal sector in Jayapura are the human resources and demand of product are positively, and the influences of flexibilities is negative.*

**Keywords:** *informal sector, flexibility and productivity*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan mengkaji kondisi sektor informal perkotaan dalam perekonomian kota Jayapura–Papua, utamanya dalam hal tingkat fleksibilitas dan produktivitasnya. Dengan menggunakan metode kajian pustaka atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kondisi sektor informal di kota Jayapura sangat fleksibel dalam menerima tenaga kerja dengan latar belakang yang berbeda-beda (jenis kelamin, umur, suku, tingkat pendidikan, bahkan modal). Produktivitas mereka juga sangat tinggi, karena omzet yang dihasilkan oleh seorang pelaku sektor informal jauh lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat fleksibilitas sektor informal kota Jayapura adalah sumberdaya manusia dan permintaan, yang berpengaruh negatif, berkebalikan dengan pengaruhnya terhadap produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberi perhatian terhadap sektor informal melalui pelatihan, pengembangan infrastruktur, proyek-proyek padat karya dan juga dengan penegasan status politik Papua agar menarik investor luar

**Kata Kunci:** sektor informal, fleksibilitas dan produktivitas

Wilayah Papua yang sebelumnya bernama Irian Jaya, adalah merupakan wilayah NKRI yang paling muda, karena baru terintegrasi dengan Republik Indonesia pada bulan Mei 1963. Sebelumnya, wilayah ini merupakan pertikaian antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia (United Nation dalam Kaiwai, 2007:1). Kaiwai menyebutkan semenjak berintegrasi dengan Indonesia, maka pembangunan Papua mulai dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Sebagai wilayah yang baru dibuka dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah,

menjadikan Papua incaran sebagian besar pencari kerja di seluruh wilayah Indonesia, baik yang memiliki pendidikan dan keterampilan memadai maupun yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan. Bagi yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang memadai kurang mengalami permasalahan, karena sebagian besar dari mereka langsung diterima sebagai pegawai negeri dan swasta yang formal. Namun bagi mereka yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sebagian besar mencari usaha-usaha yang sifatnya informal.

Kehadiran sektor informal perkotaan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang muncul sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota. Mereka yang memasuki usaha berskala kecil ini, pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Kebanyakan dari mereka yang terlibat adalah orang-orang migran dari golongan miskin, berpendidikan rendah dan kurang terampil. Latar belakang mereka bukanlah pengusaha dan juga bukan kapitalis yang mengadakan investasi dengan modal yang besar. Namun harus diakui bahwa banyak di antara mereka telah berhasil mengembangkan usahanya dan secara perlahan-lahan memasuki dunia usaha berskala menengah bahkan berskala besar. Ada tiga fenomena penting yang perlu disikapi sedang terjadi dalam ketenagakerjaan pada berbagai kota di negara yang sedang berkembang, khususnya Jayapura, yaitu: (1) Kecenderungan semakin meningkatnya peranan usaha sektor informal dalam ketenagakerjaan dan mampu memberikan pendapatan bagi pelakunya; (2) Kecenderungan fleksibelnya sektor informal dalam menerima tenaga kerja dari berbagai latar belakang yang berbeda (jenis kelamin, umur, pendidikan, keterampilan/ keahlian dan modal); dan (3) Adanya peluang sektor informal perkotaan untuk berkembang/produktif sama seperti sektor formal.

Teori tentang sektor informal pertama kali diperkenalkan Keith Harth, seorang antropolog Inggris dari Manchester University dalam penelitiannya yang berjudul *Informal Income: Opportunities and Urban Employments in Ghana* pada tahun 1971 (Rahmatia, 2004:49; Hidayat, 1998). Harth menggambarkan sektor informal sebagai angkatan kerja perkotaan (*urban labour force*), yang berada di luar pasaran tenaga kerja yang terorganisir dan teratur. Kemudian istilah tersebut diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1977 melalui penelitian Moir (Manning, 2001) dengan mengembangkan konsep ILO dan menyatakan bahwa sektor informal perkotaan di Indonesia disamping merupakan urban labour force yang berada di luar pasaran tenaga kerja yang terorganisir dan teratur, juga tidak mempunyai hubungan formal dengan pemerintah dan tidak tergantung pada bahan-bahan atau teknologi impor, serta jangkauan (radius) pemasarannya tidak terlalu luas. Hidayat (1998) menyatakan bahwa sektor informal di Indonesia muncul berhubungan dengan besarnya populasi dan pertumbuhan angkatan kerja yang

tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja dalam suatu wilayah. Sedang menurut Rahmatia (2004) sektor informal perkotaan muncul disamping sebagai ketakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja juga sebagai pertanda kegagalan pemerintah dalam penataan sistem ketenagakerjaan, peningkatan pendidikan serta lemahnya pemerintah dalam perencanaan pengembangan wilayah yang menciptakan lapangan kerja.

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, Alisjahbana (2006) melihat sektor informal sebagai akibat dari daya dorong pedesaan dan daya tarik perkotaan. Banyaknya sektor informal diberbagai kota besar di dunia, termasuk di Indonesia tidak lepas dari adanya urbanisasi dan daya dorong sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta tingkat upah yang sangat rendah di desa. Pandangan yang sama di kemukakan oleh Setiono (2004:12) yang menyebutkan bahwa kota dengan berbagai kemajuan dan fasilitasnya merupakan daya tarik, sementara desa dengan berbagai keterbatasan dan keterbelakangannya akan merupakan daya dorong, sehingga menjadikan kehidupan di kota menjadi alternatif utama bagi sebagian mereka yang ingin menyelamatkan diri dari tekanan kemiskinan di desa. Akibatnya secara berangsur-angsur terjadilah sebuah situasi akilbalik yang sangat dramatis yang disebut sektor informal atau sering disebut ekonomi dibawah tanah (*underground economy*) atau ekonomi bayangan.

Banyak ahli seperti B.J. Habibie yang mendukung keberadaan sektor informal perkotaan dalam suatu tatanan perekonomian suatu wilayah karena sektor ini telah terbukti lebih tahan terhadap resesi ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar. Salatta (2007:46), dan Haris (2004:73), juga bersepakat bahwa sektor informal telah menyelamatkan ketenagakerjaan di kota-kota besar di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan tambahan pendapatan bagi pelakunya. Setiono (2004:5) menyebutkan bahwa sektor ini telah memberikan andil  $\pm 65\%$  dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup penduduk Indonesia yang telah berjumlah  $\pm 40$  juta yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sisi positifnya juga dirasakan ditempat asal mereka, karena para pelaku sektor informal perkotaan umumnya mengirim uang ke desa minimal sekali setahun. Pengiriman uang tersebut

mampu menambah dinamika kehidupan ekonomi wilayah pedesaan. Pandangan yang sama juga di kemukakan Manning (2001) yang menyatakan bahwa sebagian besar (63%) tenaga kerja yang ada di Indonesia bergerak di sektor informal.

Namun ada beberapa ahli menentang keberadaan sektor informal, dengan argumentasi bahwa sektor ini merupakan lambang tidak sehatnya perekonomian suatu daerah, serta menghambat pengembangan, penataan serta ketertiban wilayah perkotaan (Manning, 1996). Kemudian Sadoko (2000) menyatakan bahwa suatu saat ekonomi informal di perkotaan akan menghilang secara perlahan-lahan, karena sektor informal hanya bersifat sementara. Mereka merupakan fungsi dari suatu sistem perekonomian yang tradisional dalam suatu wilayah, dan selalu berada pada fase masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada saat target industrialisasi tercapai, maka tenaga kerja akan terserap dengan sendirinya oleh sektor-sektor formal, sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan pada akhirnya masyarakat tidak butuh lagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor informal.

Terlepas dari perbedaan kedua pendapat tersebut, seharusnya sektor ini bisa dianggap sebagai bagian dari asset negara yang perlu diperhatikan dan dibina agar lebih berperan dalam perekonomian dan ketenagakerjaan, sehingga tidak menghambat pengembangan, penataan, dan ketertiban wilayah perkotaan. Hal ini searah dengan pendapat Haris (2004:124) yang menyatakan “sekali pun dilihat dari segi produksi sektor informal secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi ternyata dapat menunjang kehidupan dari sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu kemiskinan”.

Belum ada kesepakatan yang jelas tentang batasan sektor informal. Berbagai ahli mencoba mengidentifikasi ciri-ciri batasan tersebut. Hidayat (1998) misalnya, mencoba memberikan batasan tentang sektor informal di Indonesia dengan mengacu pada beberapa hasil penelitian. akhirnya Hidayat menyimpulkan ciri-ciri pokok sektor informal sebagai berikut: (1) Merupakan kegiatan yang tidak terorganisir dengan baik, karena itu keberadaannya tidak menggunakan atau berhubungan dengan lembaga formal dan fasilitas yang tersedia; (2) Umumnya tidak memiliki izin usaha; (3) Kegiatannya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja; (4) Kebijakan maupun bantuan pemerintah tidak menyentuh sektor ini; (5) Para pelakunya mudah ke-

luar masuk, karena tidak terlalu memerlukan skill dan modal besar; (6) Metode dan teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional; (7) Modal yang digunakan relative kecil dan perputarannya agak lambat; (8) Tidak memerlukan pendidikan, keterampilan maupun pengalaman yang tinggi; (9) Tidak mempekerjakan orang, dan kalau mempekerjakan orang, maka sebagian besar berasal dari anggota keluarga, atau kenalan; (10) Sumber modal umumnya berasal dari tabungan sendiri, pinjaman dari kenalan, atau lembaga tidak resmi; dan (11) Hasil produksi yang dihasilkan dan ditawarkan terutama barang kebutuhan pokok atau barang yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Dalam waktu yang bersamaan, Rilis (2009:37) memberikan batasan bahwa pelaku sektor informal adalah mereka yang bekerja sendiri ataupun usaha-usaha yang mempunyai pekerja kurang dari lima orang, peraturan upah minimum dan faktor-faktor institusional kurang berpengaruh terhadap penghasilan, serta penghasilan yang tetap rendah (karena suplai tenaga kerja berlebih). Kemudian Manning (2001) memandang sektor informal sebagai kutub pengaman dalam menampung ledakan angkatan kerja di perkotaan, mereka umumnya berasal dari desa-desa yang ada di sekitarnya dengan membawahi berbagai latar belakang keterbatasan.

Jika dilihat dari sisi penyerapannya terhadap tenaga kerja, secara nasional peranan sektor informal sudah sangat jelas (Manning, 2001; Setiono, 2004:5). Secara regional, di beberapa kota yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat juga menampakkan kondisi yang sama. Beberapa hasil penelitian menunjukkan kondisi tersebut, seperti yang dilakukan Nuralam (2006: 36) yang menyebutkan bahwa tidak kurang dari 2/3 tenaga kerja yang ada di distrik Abepura, kota Jayapura merupakan pekerja yang ada di sektor informal, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang migran. Rumatatur (2001: 28) dalam studinya menyebutkan bahwa sekitar 75% pekerja wanita Papua berada pada sektor informal, dimana sebagian merupakan pekerjaan pokok keluarga maupun penunjang pendapatan suami yang mempunyai pekerjaan lain. Lamba (2007; 41) yang meneliti beberapa kota di wilayah Papua, juga menemukan bahwa ada ±60-70% tenaga kerja yang ada di berbagai kota di Papua bekerja pada sektor informal, mereka memasuki semua sektor seperti;

perdagangan, industri, jasa, transportasi, pertanian sampai perbankan.

Demikian juga, jika melihat sektor informal dari sisi pendapatan, maka banyak peneliti di kota-kota besar telah menemukan bagaimana peran sektor informal ini sebagai sumber pendapatan. Moir dalam Chandrakirana dan Sadoko (1995) menyatakan “pada tahun 1981 sektor informal dapat menyumbangkan ± 30% total pendapatan regional kota Jakarta”. Papanek dalam Salatta, (2007:96) menyebutkan bahwa kendati mereka kelihatan miskin, para migran dalam sektor informal mempunyai tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dari pada waktu mereka masih berada di desa. Sementara itu secara regional, di beberapa kota yang ada di provinsi Papua, juga menampakkan kondisi yang sama. Seperti hasil penelitian Lamba (2009:42) yang menemukan bahwa sebagian besar (75%) pelaku sektor informal yang ada di kota-kota di Papua mempunyai tingkat pendapatan di atas dari Upah Minimum Regional (UMR), bahkan ada sekitar 7- 15% yang memiliki tingkat pendapatan 5- 10 juta perbulan. Rumalatur (2001:29) dan Nuralam (2006: 36) juga menemukan bahwa sebagian besar penghasilan pelaku sektor informal sangat cukup untuk membiaya kebutuhan keluarga mereka, bahkan bisa mengirim uang ke kampung secara rutin.

Tingginya peranan sektor informal perkotaan dalam perekonomian provinsi Papua, utamanya pada bidang penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat, sebenarnya tidak terlepas dari akibat kondisi tingkat fleksibilitas dan produktivitasnya.

Fleksibilitas sektor informal yang ada di Papua umumnya dan khususnya kota Jayapura sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari kelonggaran sektor ini dalam menerima tenaga kerja dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda (jenis kelamin, umur, suku, tingkat pendidikan bahkan modal) (Lamba, 2009: 42). Ada tiga faktor apa yang mempengaruhi fleksibelnya sektor informal tersebut (Syamsu, 2005) yaitu; lokasi, permintaan dan sumberdaya manusia.

Sedangkan Lamba (2010:236) menemukan bahwa sumber daya manusia adalah faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap fleksibilitas sektor informal di kota Jayapura. Diikuti oleh permintaan sebagai faktor kedua. Sedangkan lokasi tidak berpengaruh terhadap fleksibilitas sektor informal.

Tingginya pengaruh faktor sumber daya manusia ini, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (a) Tingkat pendidikan pelaku sektor informal yang ada di kota Jayapura masih relatif rendah, yaitu cenderung terkonsentrasi pada tingkat pendidikan SMA sederajat ke bawah. Dalam kondisi seperti ini maka tingkat kepekaan pendidikan, keterampilan dan pengalaman terhadap lapangan kerja sektor informal akan sangat tinggi, sehingga begitu ada masyarakat pencari kerja yang mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman sedikit lebih tinggi dan ingin menjadi pelaku atau pekerja dalam sektor informal, maka akan sangat mudah (sangat fleksibel); (b) Jumlah sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaku dan pekerja pada sektor informal di kota Jayapura, disamping persentasenya belum sebesar di kota-kota besar, juga masih terkonsentrasi pada penggunaan 1 (satu) tenaga kerja, bahkan ada yang belum menggunakan tenaga orang lain. Sehingga sektor ini disamping masih sangat banyak peluang untuk membuka usaha di sektor ini, juga masih sangat fleksibel dalam menerima tenaga kerja.

Permintaan adalah faktor yang mempunyai pengaruh terbesar kedua terhadap fleksibilitas sektor informal di kota Jayapura (Lamba, 2010). Besarnya pengaruh faktor permintaan ini, disebabkan beberapa hal: (a) Kondisi penyebaran penduduk kota Jayapura yang tidak merata yang mengakibatkan penduduk cenderung memenuhi kebutuhannya dari apa yang ditawarkan di daerah sekitar mereka. Suasana tersebut akan membuat permintaan terhadap suatu barang dan jasa meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat pencari kerja untuk menjawab permintaan tersebut dengan membuka berbagai usaha-usaha kecil yang sifatnya informal; (b) Setiap konsentrasi pemukiman penduduk cenderung mengarah kepada satu jenis pekerjaan, seperti konsentrasi pemukiman pegawai negeri dan pegawai swasta formal. Kesibukan mereka di kantor, membuat mereka cenderung memenuhi kebutuhannya dari apa yang ditawarkan di sekeliling pemukiman, sehingga mendorong sebagian dari mereka yang tidak terlalu sibuk atau yang belum bekerja untuk membuka usaha kecil-kecilan/informal. Sehingga konsentrasi pemukiman ini menjadi fleksibel terhadap usaha sektor informal; dan (c) Kesenjangan ekonomi masyarakat penduduk di kota Jayapura masih

sangat tinggi, sehingga masyarakat yang hidup pada tingkat ekonominya menengah-bawah, cenderung memenuhi kebutuhannya dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh sektor informal, karena harganya relatif lebih murah dari pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh sektor formal, walaupun kualitasnya mungkin juga sedikit lebih rendah. Kecenderungan ini merupakan peluang baik bagi masyarakat atau pencari kerja untuk melayani permintaan tersebut dengan membuka usaha-usaha kecil yang sifat informal, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi seperti ini akan dapat mendorong meningkatkan fleksibilitas sektor informal.

Faktor lokasi tidak mempunyai pengaruh terhadap fleksibilitas sektor informal di kota Jayapura, karena pelaku sektor informal di kota Jayapura jumlahnya masih tergolong sedikit dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, sehingga masih terbuka banyak peluang bagi pencari kerja atau pengusaha yang mempunyai minat untuk masuk dalam sektor ini di wilayah kota Jayapura. Hal ini mengakibatkan indikator-indikator lokasi, utamanya yang bersifat menghambat, tidak dapat mempengaruhi tingkat fleksibilitas sektor informal yang ada di kota Jayapura. Selain itu, kota Jayapura merupakan daerah pantai dan dekat dengan beberapa daerah belakang (pedesaan), sehingga ketepatan dalam menerima barang dari luar, baik itu barang industri yang melalui pantai maupun barang hasil pertanian yang berasal dari pedesaan, tidak menjadi masalah dimanapun mereka berusaha dalam wilayah kota Jayapura. Karena itu lokasi tidak berpengaruh terhadap fleksibilitas sektor informal Jayapura. Tingkat keamanan Jayapura juga cukup baik dan relatif merata, utamanya dari gangguan pencuri dan pengemis atau pungutan-pungutan lainnya yang tidak resmi. Suasana tersebut merupakan peluang bagi pencari kerja atau yang mau berusaha dalam sektor ini, untuk melakukan aktivitas dimanapun juga dalam wilayah kota Jayapura tanpa perlu memikirkan masalah keamanan.

Produktivitas sektor informal yang ada di Jayapura sangat tinggi, karena rata-rata omzet yang dihasilkan oleh seorang pelaku sektor informal jauh lebih besar (2-4 kali) dari biaya yang digunakan (Lamba, 2007). Syamsu (2005) menemukan ada empat variabel yang mempengaruhi produktivitas sektor informal, yaitu lokasi, permintaan, sumberdaya manusia dan fleksibilitas.

Lamba (2010:238) menemukan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap produktivitas sektor informal di kota Jayapura. Akibatnya persentase pertumbuhan atau kenaikan pelaku sektor ini di Jayapura sangat tinggi, sehingga walaupun jumlah sumberdaya manusia yang terlibat sebagai pelaku dan pekerja pada sektor ini belum sepadat kota-kota besar lainnya, namun perilaku persaingan diantara mereka sudah mulai kelihatan. Namun para pengusaha sektor informal di kota Jayapura mayoritas hanya menggunakan satu, bahkan ada yang belum menggunakan tenaga orang lain, sehingga sektor ini masih potensial untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan cara menggunakan/menambah tenaga kerja.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap produktivitas sektor informal di kota Jayapura adalah permintaan. Penyebaran penduduk kota Jayapura yang tidak merata, terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu karena dibatasi oleh lembah, gunung, laut dan danau, mengakibatkan adanya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dari apa yang ditawarkan di daerah sekitar mereka. Pada akhirnya permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat di daerah-daerah tersebut, sehingga mendorong pelaku atau pekerja sektor informal untuk menjawab permintaan tersebut dengan meningkatkan produktivitas mereka. Disamping itu, konsentrasi penduduk yang cenderung mengarah kepada satu jenis pekerjaan, seperti konsentrasi pemukiman pegawai negeri, pemukiman pegawai swasta formal, membuat penduduk cenderung memenuhi kebutuhannya dari barang dan jasa yang ditawarkan di sekeliling pemukiman mereka. Sehingga pelaku sektor informal yang berada di sekitar pemukiman pegawai negeri dan swasta lebih produktif daripada pemukiman yang terpencar. Adanya kesenjangan ekonomi masyarakat kota Jayapura yang cukup tinggi, membuat masyarakat yang hidup dengan tingkat ekonominya menengah kebawah, cenderung untuk memenuhi kebutuhannya dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh sektor informal, karena harganya relatif lebih murah dari pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh sektor formal, walaupun kualitasnya kemungkinan juga sedikit lebih rendah. Kecenderungan ini merupakan peluang besar bagi pelaku atau pekerja sektor informal untuk memenuhi permintaan tersebut dengan meningkatkan produktivitas mereka.

Faktor lokasi ditemukan tidak berpengaruh terhadap produktivitas sektor informal yang ada di kota Jayapura, karena Jayapura sebagai kota yang baru berkembang, penataan tata ruang belum menjadi prioritas, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah belum menyentuh tentang bagaimana menata ketertiban dan keindahan kota, tata kelola tenaga kerja yang baik, sehingga kehadiran sektor informal belum mendapatkan perhatian yang serius. Suasana ini juga merupakan peluang yang dapat mendorong bagi para pelaku dan pekerja sektor informal untuk meningkatkan produktivitas dimanapun mereka berlokasi dalam wilayah kota Jayapura. Kondisi alam Jayapura yang tidak rata karena dibatasi oleh banyak lembah, gunung, laut dan danau, membuat pola kehidupan masyarakat kota Jayapura bersifat lokal dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga faktor lokasi tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Dimanapun pelaku sektor informal berada, mereka tetap mempunyai konsumen.

Temuan lain yang menarik adalah adanya pengaruh negatif yang cukup besar dari faktor fleksibilitas terhadap produktivitas sektor informal di kota Jayapura. Fleksibelnya sektor informal di kota Jayapura dalam menerima tenaga kerja, menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah pelaku dan pekerja sektor informal yang ada di kota Jayapura lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk. Hal ini berarti secara rata-rata masyarakat sebagai konsumen untuk setiap pelaku sektor informal akan menurun. Dalam kondisi seperti ini, maka produktivitas untuk setiap usaha sektor informal lambat laun akan dapat bekurang. Fleksibilitas sektor informal di kota Jayapura dalam menerima pelaku dan pekerja dengan latar belakang karakteristik yang berbeda-beda (pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang rendah) mengakibatkan kecenderungan kualitas sumberdaya manusia yang ada di dalam sektor ini tidak akan meningkatkan produksi mereka. Dengan demikian, kondisi ini akan dapat mengganggu produktivitas yang sudah ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sektor informal yang ada di

kota Jayapura sangat fleksibel dalam menerima tenaga kerja dengan latar belakang yang berbeda-beda (jenis kelamin, umur, suku, tingkat pendidikan, bahkan modal). Produktivitas sektor ini juga sangat tinggi, karena omzet yang dihasilkan oleh seorang pelaku sektor informal jauh lebih besar dari biaya yang digunakan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fleksibilitas sektor informal di kota Jayapura adalah sumberdaya manusia dan permintaan, karena tingkat pendidikan pelaku sektor informal di kota Jayapura masih relatif rendah, mayoritas hanya menggunakan 1 (satu) tenaga kerja, penyebaran penduduk kota Jayapura juga tidak merata, sehingga bersifat lokal, dan terakhir adalah karena adanya kesenjangan ekonomi masyarakat Jayapura. Namun, ada beberapa hal yang berpengaruh negatif terhadap fleksibilitas, misal karena fleksibelnya sektor ini, menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah pelaku dan pekerja sektor informal yang melebihi peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena lebih tingginya persentasi peningkatan jumlah pelaku dan pekerja sektor informal dibanding peningkatan jumlah penduduk, akan menurunkan jumlah konsumen untuk setiap pelaku sektor informal. Kualitas sumberdaya manusia yang ada didalam sektor informal tidak akan mempunyai kemampuan untuk dapat meningkatkan produksi mereka.

### Saran

Mengingat hasil kajian pustaka sebelumnya, perlu dibuat penelitian yang melihat faktor-faktor lain selain dari faktor lokasi, permintaan dan SDM, sehingga dapat diketahui peranan faktor lainnya dalam mempengaruhi fleksibilitas dan produktivitas sektor informal. Perlunya penelitian tentang fleksibilitas maupun produktivitas pada sektor lain (bukan sektor informal) agar dapat diperbandingkan mana yang lebih fleksibel dan produktif.

Pemerintah seharusnya membina dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaku sektor informal melalui pelatihan, kursus atau magang, agar mereka lebih mampu dalam mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar, sehingga suatu saat dapat memungkinkan untuk beralih masuk sebagai pelaku usaha formal. Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembuatan proyek-proyek

padat karya, agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah juga harus tegas dan mensosialisasikan tentang status politik Papua agar investor-investor dari luar Papua tertarik untuk datang menanamkan modalnya, dan bagi pengusaha-pengusaha sudah ada di Papua dapat menambah modalnya, dengan cara membuka industri-industri atau usaha-usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Penataan dan penertipan tata ruang juga perlu dilakukan, agar para pelaku ekonomi mempunyai kejelasan tentang lokasi dari

setiap aktivitas, sehingga mereka lebih leluasa dalam meningkatkan produktivitas mereka tanpa harus takut digusur. Infrastruktur transportasi (jalan raya) perlu ditingkatkan, agar para pelaku ekonomi baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen lebih leluasa dalam menjalankan aktivitasnya. Terakhir, membantu industri-industri rumah tangga dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya dalam merintis jaringan pemasaran, agar produk-produk mereka dapat cepat laku, pada akhirnya akan memungkinkan untuk meningkatkan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press., Surabaya.
- Haris, M. 2004. *Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil Di Sulawesi Selatan*. Desertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hidayat. 1998. *Pengembangan sektor informal dalam pembangunan nasional: masalah dan prosep*. PPESM. Fakultas Ekonomi Padjadjaran. Bandung.
- Raharjo, A. 2005. *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*. lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin (Lephas). Makassar.
- Iskra, B. & Tsanov. 2007. *Labour Market Flexibility and Employment Security. Employment Paper 2007*. Geneva Internasional Labour Office.
- Syamsu, A. 2005. *Faktor-faktor yang menentukan produktivitas usaha sektor informal Di Sulawesi*. Desertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Lamba, A. 2007. *Masalah Ketenagakerjaan dan upaya pemerataan kesempatan kerja bagi Etnis Papua dengan Kaum Migran dalam sektor Informal perkotaan di Provinsi Papua*. Penelitian Hiba Fundamental Dikti. Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasi, Jayapura.
- Lamba, A. 2009. *Kajian Kehadiran Dan Strategi Pembinaan Usaha Sektor Informal Di Provinsi Papua*. Penelitian Hiba Prioritas Nasional Batch IV, Dirjen Dikti, Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Verlyt. 2008. *Teori, Analisis Produktivitas dan aplikasinya dalam dunia usaha*. PT Gramedia Pustaka Ilmu. Jakarta.
- Lanvba, A. 2010. *Fleksibilitas dan Produktivitas Sektor Informal Perkotaan di Kota Jayapura-Papua*, Desertasi Universitas Brawijaya, Malang
- Kaiwai, H. 2007. *Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Petani Penduduk Asli dan Petani Transmigrasi Di Kabupaten Jayapura*, Disertasi S3. Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Manning, C. 2001. *Angkatan Kerja Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia Dewasa Ini*; CV Rajawali, Jakarta
- Manning, C, Noer, E.T dan Tukiran. 1996. *Struktur pekerjaan sektor informal dan kemiskinan di Kota*. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sadoko, I. 2000. *Dinamika Kehidupan Ekonomi Sektor Informal Di Indonesia*, UI -Press, Jakarta
- Teri, C. 2007. *Collective Labour Rights & Labor Market Flexibility in East Asia* Unpublished. Paper in the Dept. Of Political Sciences Univ of Minnesota Twin Cities..